

# Sertifikat



## SERTIFIKAT

Nomor : 010/Pokja/Inkl/XI/2009

Diberikan kepada

*Dr. Budiyanto*

Sebagai **NARASUMBER** pada Seminar Pendidikan Inklusif dengan tema "Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif", yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2009 di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Di. Panjaitan No. 4 Palangka Raya.

Palangka Raya, 25 November 2009

Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Pusat,

**PRAPTONO, M.Ed.**  
NIP. 19691105 19943 1 002

Ketua Pokja Pendidikan Inklusif  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**LILIS LISMAYA, S.Pd.**  
NIP. 19560617 198003 2 005



Sekretariat : Jl. RTA Milono Km. 2,5  
Palangka Raya 73111  
Telepon : (0536) 3224878

# FILOSOFI DAN PRINSIP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF

Disampaikan oleh: Dr. Budiyanto, M.Pd.

Seminar Pendidikan Inklusif  
Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kalimantan Tengah  
Palangka Raya, 25 November 2009

## I. PENDAHULUAN

### A. Filosofi

Pendidikan inklusif sebagai konstruk baru dalam konteks pendidikan baik pada skala internasional maupun nasional tentunya harus berangkat dari konsep filosofi dan nilai-nilai yang mendasar, karena pada hakekatnya filsafat dan nilai-nilai dasar dalam pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pendidikan, merumuskan ciri dan karakteristik masyarakat, serta perumusan peran serta pemberdayaan dalam pendidikan (Depdiknas, 2002).

#### 1. Pergeseran Filsafat dalam Pendidikan

Wiles dan Bondi (1998), Sunardi (2003) mengemukakan lima jenis filsafat pendidikan utama, yaitu perenialisme, idealisme, realisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme. *Perenialisme*, merupakan filsafat pendidikan yang paling konservatif, tradisional, dan tidak luwes. Pendidikan dipandang sebagai persiapan untuk hidup, menekankan pengembangan rasionalitas, dan bersifat konstan. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran dan doktrin, berisi fakta yang dianggap abadi, dan tugas guru adalah menyampaikan kebenaran sebagai pelatihan pengembangan rasionalitas. Peserta didik merupakan penerima yang pasif. Menurut filsafat *idealisme*, kebenaran ditemukan pada konsistensi pendapat. Di sekolah, guru merupakan model perilaku ideal, dan tugas sekolah adalah penajaman proses intelektual, penyampaian temuan masa lalu, dan penyajian perilaku ideal. Murid bersikap pasif, menerima dan menghafalkan apa yang disampaikan oleh guru. Menurut filsafat *realisme*, kebenaran ditemukan pada hukum alam. Kurikulum sekolah didominasi dengan mata-mata pelajaran sains dan matematika, dan tugas guru adalah menyajikan kebenaran. Pelajaran sangat terkendali dan peserta didik secara pasif menerima kebenaran yang disajikan guru. Bagi filsafat *eksperimentalisme*, dunia selalu berubah-ubah. Kebenaran adalah apa yang dialami. Sekolah menekankan pada pengalaman dan mata-mata pelajaran sosial, melalui kegiatan pemecahan masalah, dan tugas guru adalah membantu peserta didik yang secara aktif menemukan apa yang terjadi di dunia ini. Bagi filsafat *eksistensialisme*, kebenaran sangat subyektif dan individual. Pendidikan bertujuan membantu peserta didik mengenal diri dan lingkungannya. Kurikulum ditentukan secara individual dan interaksi guru murid terpusat pada perjalanan belajarnya secara pribadi.

Filsafat tersebut di atas telah membuahkan dua model besar pendidikan, yaitu pendidikan tradisional (yang lebih banyak bersumber dari filsafat perenialisme, idealisme dan realisme) dan pendidikan progresif (yang bersumber dari filsafat eksperimentalisme dan eksistensialisme).

**Pendidikan tradisional** merupakan proses transmisi pengetahuan / fakta / kenyataan yang ditemukan masa lalu. Anak tidak dilatih untuk menggunakan metode-metode subyektif dalam menganalisis dunia, tetapi 'otak' mereka diisi dengan pengetahuan untuk dikembangkan lebih lanjut (Gonzales, 1982). Sejalan dengan falsafah yang melandasinya, kurikulum berisi fakta / temuan masa lalu, guru merupakan sumber utama materi dan pengelola sentral pembelajaran, siswa merupakan penerima pasif, dan kelas sangat terstruktur.

**Pendidikan progresif** yang diangkat dari filsafat pragmatis berpandangan bahwa nilai ditentukan oleh manfaat, dan dalam pendidikan, manfaat harus dilihat pada peserta didik (Travers dan Rebores, 1987). Pendidikan progresif menekankan pentingnya kebutuhan dan minat peserta didik, penguasaan pengetahuan fungsional melalui kegiatan pemecahan masalah dengan tujuan yang jelas, kesempatan memadai untuk berekspresi, dan keterlibatan dalam pengalaman kooperatif (Connel, 1987), atau menurut Wiles dan Bondi (1998), pendidikan progresif menekankan demokrasi, pentingnya kegiatan kreatif dan bermakna, kebutuhan riil peserta didik, dan kaitan antara sekolah dengan masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### A. Filosofi Pendidikan Inklusif

Meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman sekaligus mengeliminir paradigma penyeragaman dan penyamarataan. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan sehingga harus diperlakukan secara eksklusif, tetapi dipandang sebagai kekayaan yang harus disyukuri (Mulyono, 2002). Untuk itu setiap anak haruslah mampu memberikan layanan kepada semua anak secara inklusif. Meijer, dkk (1997), menyebutnya dengan "*differentiates education for this diversity*". Secara terinci Etscheidt, (2002), menyatakan bahwa inklusi berbasis pada kepercayaan bahwa orang-orang atau orang dewasa bekerja pada komunitas inklusif, bekerja bersama orang-orang yang berbeda ras/suku, agama, pendapat, cacat. Dalam baris yang sama, anak-anak dari semua umur harus belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mempunyai lingkungan dimana akhirnya mereka akan bekerja di dalamnya.

Sementara filosofi yang berkaitan dengan setting prasekolahan, Wilson (2002), membuat ilustrasi sebagai berikut. "Bila dicermati secara mendalam sistim persekolahan dewasa ini tidak ubahnya seperti model suatu perusahaan, dimana setiap individu yang

terlibat di dalamnya sibuk dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing tanpa mempedulikan yang lainnya”. Sementara standar seting suatu sekolah itu terpusat pada pengembangan mentalitas, sekolah tidak hanya sekedar pengajaran, tetapi bagaimana agar setiap individu menjadi lebih responsif terhadap keadaan sekitarnya. Pernyataan tersebut bermakna bahwa sistim sekolah itu hendaknya tidak hanya terpusat pada pengembangan kognitif semata, tetapi dimensi mentalitas juga harus mendapat porsi yang seimbang. lebih lanjut Wilson, menyatakan “bila Anda mencermati tujuan sekolah-sekolah secara terpadu dan memikirkan cara pembelajaran untuk keuntungan semua siswa, itulah pendidikan inklusif.

Konsep filosofis di atas sejalan dengan deklarasi UNESCO (1998) tentang pendidikan nilai, yaitu “**Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni**” sementara APNIEVE (Devisi UNESCO untuk Wilayah Asia Pasifik dalam aksinya menjabarkan Pendidikan Nilai untuk Perdamaian, Hak-hak sasi Manusia, Demokkrasi dan Pembangunan Berkelanjutan, selanjutnya dijabarkan menjadi; (1) penghapusan semua bentuk diskriminasi, (2) perlindungan hak-hak asasi manusia dan demokrasi, (3) pembangunan yang adil berimbang, manusiawi dan berkelanjutan, (4) perlindungan lingkungan. Dan (5) perpaduan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer dan tradisional. Nilai-nilai inti yang terkandung dalam perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan, dan nilai-nilai yang terkait yang mendukung seperti tercantum pada bok berikut:

**Bok 5: Diskripsi Nilai Inti Perdamaian, Hak-hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan**

<b>Perdamaian</b>	<b>Hak-hak asasi manusia</b>
Cinta	Kebenaran
Keharuan	Kesamaan dan keadilan
Harmoni	Penghormatan atas martabat manusia
Toleransi	Integritas
Mengauh dan berbagi	Akuntabilitas
Independensi	Kejujuran
Pengenalan jiwa orang lain	Kesediaan menerima
Spiritualitas	Penghargaan atas kemajemukan
Perasaan berterimakasih	Kebebasan dan tanggungjawab
	Kerjasama

<b>Demokrasi</b>	<b>Pembangunan berkelanjutan</b>
Penghormatan atas hukum dan ketertiban	Kesangkilan atau efesisiensi
Kebebasan dan tanggung jawab	Orientasi masa depan
Kesamaan	Memperhatikan lingkungan
Disiplin diri	Pengurus sumber daya
Kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab	Kreativitas
Keterbukaan	Kehematan
Berpikir kritis	Kesederhanaan
Solidaritas	Ekologi pribadi

Diadopsi dari Kantor Prinsipal UNESCO untuk kawasan Asia Pasifik, Bangkok UPI

(2000)

Nilai-nilai dasar lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif berkaitan dengan keberadaan anak yang termuat dalam Pernyataan Salamanca (1994) butir kedua, yaitu (1) Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar, (2) Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, (3) Sistem pendidik seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut, (4) Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam kerangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, (5) Sekolah reguler dengan orientasi tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua; lebih jauh sekolah macam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya seluruh sistem pendidikan.

Konsep filosofis dan nilai-nilai dasar di atas secara konseptual potensial menimbulkan perubahan dalam kesadaran dan sikap, ketersediaan fasilitas, metodologi, yang dapat mempengaruhi konsep dan keinginan. Konsekuensi penting terhadap perubahan tersebut

akan mempertajam dalam pemahaman dan apresiasi pada *diversity* (Johnsen dan Skjorten, 2001).

Kondisi-kondisi tersebut menciptakan berbagai macam tantangan bagi sistem persekolahan dalam konteks kebutuhan pendidikan khusus. Banyak anak mengalami kesulitan belajar dan oleh karenanya memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada saat mereka sedang menempuh pendidikannya. Sekolah harus mencari cara agar dapat berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan yang parah. Terdapat satu konsensus bahwa anak dan remaja yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya tercakup dalam perencanaan pendidikan yang dibuat untuk anak pada umumnya. Hal tersebut telah membawa kita pada konsep sekolah inklusi. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah inklusif adalah bahwa sekolah harus mengembangkan suatu pedagogi yang berpusat pada diri anak, yang mampu berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan parah. Keuntungan dari sekolah semacam ini bukan hanya mampu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak, tetapi penyelenggaraan sekolah tersebut juga akan merupakan langkah yang sangat penting dalam membantu mengubah sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

## **B. Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Inklusif**

Konsep paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah **bagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama** (IDEA, 1997). Johnsen dan Skojen, (2001), menjabarkan dalam 3 prinsip, yaitu (1) bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam suatu kelas atau kelompok, (2) bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati, dan (3) guru bekerja bersama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasi keaneka ragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas.

Sekolah seyogyanya mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Ini seyogyanya mencakup anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung (konferensi dunia UNESCO, 1994).

Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak. Pendidikan itu normal adanya dan bahwa oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukannya anak yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakekat proses belajar. Pedagogi yang berpusat pada diri anak itu menguntungkan bagi semua siswa dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan (UNESCO, 1994). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengalaman telah menunjukkan hal tersebut dapat sangat mengurangi angka drop-out dan tinggal kelas yang

sering merupakan bagian dari banyak sistem pendidikan, dan sekaligus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. Suatu pedagogi yang berpusat pada diri anak dapat membantu menghindarkan pengaburan sumber-sumber dan mencegah pudarnya harapan-harapan yang sangat sering merupakan konsekuensi dari kualitas pengajaran yang buruk dan mentalitas pendidikan “**satu ukuran pas untuk semua**”. Lebih jauh, sekolah yang berpusat pada diri anak merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi pada orang, yang mengharagai adanya perbedaan-perbedaan serta mejunjung harga diri semua umat manusia.

Berdasarkan ketetapan bagi anak-anak penyandang kebutuhan khusus di Wilayah Asia (*Provision for Children with Special Education Needs in Asia Region*). Sebagaimana disampaikan Lynch (1994), mengajukan tujuh prinsip menuju terwujudnya *Universal Primary Education* (UPE). Ketujuh prinsip tersebut adalah:

### **Prinsip 1: Perkembangan Kebijakan Kerangka Hukum dan Susunan kelembagaan**

Dengan adanya perkembangan ke arah UPE, Sekolah Dasar harus merespon keragamasiswa secara luas. Baik itu dalam hal latar belakang sosio ekonomi dan budaya, pola tingkah laku, kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perubahan dalam aturan perundang-undangan, organisasi dan pelaksanaannya, serta perubahan filosofi ke arah yang inklusif yang memandang bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk pendidikan dasar, dan setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda.

Hal terpenting yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan pendidikan anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus siawali dengan adanya tahun penyandang cacat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 1981); decade bagi penyandang cacat (1983-1992) sementara di wilayah Asia Pasifik ditetapiakan (1993-2002). Salah satu kunci utama dalam undang-undang dan bentuk kebijakan adalah penyediaan sumber daya dan pengesahan pendidikan bagi anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus, dengan strategi mewajibkan pendidikan integrasi, dan pendidikan segresi sebagai alternatif lain.

### **Prinsip 2: Komitmen terhadap Filsafat Pendidikan yang Berpusat pada Anak (*child-centered*)**

Pada prinsip ke dua ini pada dasarnya mengungkapkan tentang inovasi pendidikan bagi anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Dimana prinsip ini menghendaki adanya perubahan pendekatan dalam pendidikan dari pola tradisional menjadi pola pendekatan yang berpusat pada anak (*child centered pattern*). Asumsinya bahwa setiap anak memiliki kapasitas dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya, sehingga pola pendidikan tradisional yang menggunakan pendekatan klasikal, berpusat pada guru, berdasar pada materi hafalan dan tidak mempertimbangkan gaya

belajar dan latar belakang siswa) dianggap tidak relevan dengan kondisi anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus.

Pola pendidikan *child-centered* ini muncul di beberapa negara di Asia dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dan normalisasi serta mengembangkan suatu konsep baru, yaitu adanya kemitraan antara siswa, guru, lingkungan keluarga dan sekolah serta adanya koordinasi antara program pendidikan formal dan non-formal. Dengan demikian diharapkan akan mempersempit antara program pendidikan khusus dengan pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Perubahan dalam kebijakan pelaksanaan pendidikan ini merujuk pada suatu filsafat yang berdasar pada kebutuhan siswa dengan menggunakan suatu program pendidikan yang diindividualisasikan (*individualized educational program* atau IEP). Program ini diterapkan secara luas, baik dalam lingkungan pendidikan yang berbentuk segregasi maupun integrasi.

Pengintegrasian anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus ke dalam organisasi *mainstream* dan kurikulum Sekolah Dasar, tidak berarti mereka mendapatkan kurikulum yang sama, dengan cara dan langkah yang sama dengan anak-anak normal. Karakteristik utama pendidikan khusus adalah digunakannya pendekatan IEP. Pada dasarnya IEP merupakan kurikulum yang diindividualisasikan atau program belajar yang didasarkan pada gaya belajar, kekuatan dan kebutuhan khusus siswa. IEP memuat informasi tentang latar belakang siswa yang meliputi profil belajar, tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka pendek yang merupakan hasil konsultasi antara pihak sekolah, orangtua siswa, para ahli yang terkait baik staf pendidikan, kesehatan atau petugas rehabilitasi.

Dengan digunakannya konsep IEP bagi anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus, maka kurikulum yang dipergunakan perlu mendapat perbaikan dan pembenahan dalam berbagai aspek, terutama dalam metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gangguan atau ketidakmampuan yang dialami siswa.

### **Prinsip 3: Penekanan pada Keberhasilan dan Peningkatan Kualitas**

Agar pendidikan dasar lebih efektif dalam melayani siswa yang beragam, sekolah harus responsif terhadap kebutuhan para siswa serta kebutuhan guru dalam strategi mengajar, juga kemampuan untuk melaksanakan peningkatan kurikulum, sehingga dapat menyampaikan program pendidikan yang sesuai untuk semua anak. Lebih penting lagi dari hal tersebut di atas adalah perlunya perubahan filosofis dari yang berorientasi tradisional menuju pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada keberhasilan, fleksibilitas, dan akomodatif terhadap keberagaman, yaitu paradigma yang menerima konsep *universal educability* (dapat dididik), dimana semua anak dapat belajar. Hal ini mengimplikasikan dua hal, **pertama**, mengatasi adanya fragmentasi anak dengan kebutuhannya, **kedua**, mengganti gejala kegagalan di sekolah dengan etos keberhasilan.

Ada tiga alternatif orientasi tentang kesalahan fungsi sekolah yang mungkin dipersepsi, yaitu; (1) *child deficit* (kekurangan anak), dimana tanggung jawab penuh atas kegagalan

dibebankan kepada anak; (2) *environment deficit* (kekurangan lingkungan), dimana kegagalan itu dianggap menjadi tanggung jawab lingkungan sosial dan kultur anak; dan (3) pendekatan kontekstual, dimana tugas dipandang sebagian penyederhanaan kondisi siswa yang beragam dalam mencapai hasil belajar yang optimal, tegasnya perhatiannya terhadap konsep sekolah dasar inklusif itu sama saja dengan yang lainnya.

Kurikulum yang berorientasi tradisional bercirikan: guru mentransfer informasi, bersifat klasikal, menanamkan satu budaya, didasarkan pada satu buku teks, metode mengajar yang sama, kurikulum yang homogen, jam tertentu, difokuskan pada kelas, pengelompokan berdasarkan pada usia yang kaku, suasana kelas yang tegang, hanya ada sedikit alat bantu mengajar, dan hanya ada kooperasi formal. Sedangkan paradigma yang fleksibel dan akomodatif bercirikan: guru sebagai sumber belajar, metode bahan dan pendekatan yang beragam, bermacam budaya, pengajaran dengan bermacam-macam sarana, metode mengajar yang berbeda-beda dan bervariasi, kurikulum yang fleksibel dan kaya dengan isi dan bahan tambahan, jadwal dan waktu sekolah yang fleksibel, difokuskan pada kelompok dan individu, bermacam bentuk pengelompokan, suasana kelas yang merangsang, dan koooperasi formal maupun non-formal.

Dengan diterapkannya paradigma yang fleksibel dan akomodatif, menurut adanya peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru tersebut dapat dilakukan sejak berada di bangku kuliah (*face initial*), saat mulai menjadi guru (*face induksi*), maupu setelah menjadi guru (*face inservice*).

#### **Prinsip 4: Memperkuat Hubungan Antara Sistim Reguler dan Sistim Khusus**

Kepercayaan akan perlunya mengaitkan antara sekolah reguler dengan sekolah khusus secara lebih erat lagi, merupakan implikasi dari istilah *The Regular Education Initiative* (REI). REI mengajak sistim pendidikan reguler untuk bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan semua siswa dan juga memberikan saran bahwa pendidikan khusus hendaknya bertindak sebagai sumber daya bagi pendidikan reguler. REI mengimplikasikan adanya penerimaan terhadap *universal educability* dan penyabar luasan etos keberhasilan untuk menggantikan sindrom kegagalan yang ada pada sebagian besar sekolah dasar.

Di Jepang telah merintis model pendidikan yang mengarah pada sistim inklusif yang disebut "**Transactional Program**" dimana anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus diberikan sebanyak mungkin kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan sosial dengan anak-anak dari sekolah reguler. Dalam program ini memungkinkan anak cacat untuk sekolah di sekolah reguler dalam mata pelajaran tertentu. Sementara di Pilipina telah mengembangkan program "**integrasi penuh**" juga dilakukan program integrasi sebagian di waktu tertentu. Dalam hal integrasi parsial ini anak cacat yang ada di sekolah reguler mendapatkan bantuan dari guru khusus manakala ia membutuhkannya. Model pengintegrasian lain adalah apa yang disebut dengan "**kelas kooperatif**", dimana anak yang tuli diajarkan seni, matematika, sains, dan sosial dalam kelas yang menggunakan berbagai metode komunikasi.

Pendekatan tersebut mirip dengan apa yang disebut "*blenden classroom*" (kelas campuran) yang ada di Amerika Utara, dimana anak yang tidak cacat diintegrasikan ke dalam kelas yang memang dirancang khusus untuk anak cacat dengan rasio 1.5 (satu anak normal dan lima anak cacat). Pendekatan tersebut juga dikenal dengan nama "*reverse mainstreaming*" yang berarti "**kembalikan dari pemisah**" kekuatan model pendekatan ini terletak pada pengajaram oleh teman sebaya atau bantuan yang diberikan oleh anak yang normal terhadap anak yang cacat.

### **Prinsip 5: Komitmen untuk Berbagi Tanggung Jawab dalam Masyarakat**

Dibawah paradigma baru untuk pendidikan dasar, sekolah dipandang seagai bagian integral dari lingkungan masyarakat. Guru, kepala sekolah, orangtua, dan masyarakat semuanya terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga tanggung jawab atas kemajuan anak menjadi tanggung jawab bersama. Kerjasama dan pengkoordinasian antara fasilitas pendidikan khusus, guru dan sekolah reguler haruslah menjadi kegiatan yang bisa dilakukan sebab tidak ada satu sistim yang dapat memenuhi semua kebutuhan anak.

Keterlibatan orangtua dan masyarakat telah merupakan faktor utama pembangunan bagi anak-anak cacat. Dimulai dari adanya layanan penyandang cacat bagi tunanetra di Jepang pada Abad ke 8, hingga adanya Dekade bagi Penyandang Cacat di Kawasan Pasifik yang dimulai sejak tahun 1993, masyarakat senantiasa merupakan pimpinan dalam layanan bagi penyandang cacat. Sebagai contoh *Community Based Rehabilitation* (CBR) adalah rehabilitasi yang didasarkan pada masyarakat.

Beberapa negara di Asia yaitu: Nepal, India, Malaysia, Indonesia, dan Philipina sangat terkenal akan usaha rehabilitasi yang didasarkan pada masyarakat. Seluruh biaya ditanggung sendiri oleh masyarakat, dan penerima layanan ikut terlibat langsung sejak dari perencanaan hingga operasionalnya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan berskala internasional yang selama ini sangat memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak cacat antara lain *Hellen Keller International* (HKI) dan *The International Non-Governmental Organization* (INGO).

### **Prinsip 6: Pengakuan oleh Para Profesional tentang Keragaman yang Lebih Besar**

Pembekalan kepada calon guru dengan memberikan bermacam cara pembelajaran, bentuk-bentuk pendekatan yang fleksibel dan kooperatif, sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran para profesional akan keberagaman cara belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Di India guru diberikan dorongan untuk menggunakan pendekatan mengajar yang lebih fleksibel dan membantu guru tersebut agar mampu bekerja secara kooperatif dengan guru lainnya. Disamping itu di India juga telah digunakan konsep *multy category resource teacher*, dimana seorang guru sumber diberi tugas untuk membantu guru lain dalam berbagai kasus anak cacat. Pendekatan tersebut sangat berbeda dengan pendekatan konvensional, dimana

banyak guru dilatih sebagaimana mereka diajar, dan karenanya mereka secara implisit mengasumsikan bahwa anak pasti mampu belajar, namun yang terjadi tidaklah demikian.

Guru sesungguhnya membutuhkan pelatihan awal dan latihan yang terus menerus untuk mengembangkan dan memperbaharui kompetensinya untuk mengajar anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Guru dibuat sadar akan keragaman kebutuhan para siswanya dan diberikan bermacam strategi pengajaran, metode dan bahan pengajaran, metode asesmen dan respon terhadap bermacam kebutuhan khusus siswa dan meningkatkan keterlibatan keluarga dan anggota keluarga dalam pendidikan anak-anaknya.

Prinsip ini menekankan pada perubahan kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh guru, dengan perubahan dari pendidikan guru tradisional ke model baru yang bersifat pembaharuan kompetensi yang terus menerus. Dengan demikian pendidikan guru menjadi lebih fleksibel.

### III. DAFTAR PUSTAKA

Sunardi (2002). *Pendidikan Inklusif: Pra Kondisi dan Implikasi Manajerialnya*. Bandung.

UNESCO, Alih Bahasa Tarsidi, D. (2000). *Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi: Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus*. Jakarta: Braille Norway.

UNESCO-ANIEVE ( 1998) *Learning to Live Together in Peace and Harmony: Values education for peace, human rights, democracy, and sustainable development for the Asia-Pacific Region*. Bangkok: UNESCO PROAP.

\_\_\_\_\_ (2002). *Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.